

FINANCIAL DISTRESS DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH

Ilham Pradana, Sarjiyanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Author Corresponding:
Ilham Pradana

Abstract.

The purpose of this study is to measure financial distress in terms of financial ratios and local government characteristics in 38 regencies/cities in East Java Province in 2018-2023. Financial ratios are represented by the variables Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Growth Ratio. Local government characteristics are represented by Regional Government Financial Independence and Population. Secondary data is sourced from the DJPK website of the Ministry of Finance and BPS. The sampling procedure uses the total sampling method. The analytical method uses panel data regression with the help of Eviews 12 software. Based on research findings, financial distress is significantly influenced by population, effectiveness ratios and efficiency ratios. Meanwhile, the ratio of growth and financial independence of local governments has no effect on financial distress.

Keywords: Financial Distress, Financial Ratios, Local Government Characteristics

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan kinerja pemerintah ialah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tingkat kesejahteraan dan pelayanan pemerintah yang diberikan kepada warganya dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Suatu kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang dilaksanakan harus pro dengan rakyat dan dengan melakukan pengoptimalan alokasi belanja modal yang baik guna mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Beberapa tahun terakhir ini ekonomi dunia sudah mengalami kemajuan. Akan tetapi terjadi krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 2008 yang berawal dari Amerika Serikat lalu berdampak pada ekonomi negara secara global. Seperti diberitakan oleh bank terbesar di dunia, yaitu BNP Paribas, dimana terjadi ketidakpastian yang tinggi terkait pembekuan pada beberapa surat berharga kredit properti di Amerika Serikat, yang menjadi awal dari krisis ekonomi global. Masyarakat tidak mampu melunasi hutang yang membuat lembaga keuangan kehilangan likuiditas. Seluruh dunia akhirnya merasakan dampaknya, termasuk Indonesia (Miswanto & Aslan, 2019).

Kejadian tak terduga seperti *financial distress* dapat muncul sebagai akibat dari kondisi pemerintah daerah yang tidak stabil. *Financial distress* adalah akibat dari kegagalan pemerintah untuk melaksanakan semua kebijakannya, termasuk yang berkaitan dengan operasi, utang, pembangunan, dan kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat sekaligus memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. *Financial distress* pada pemerintah daerah dapat menyebabkan berkurangnya investasi modal untuk membayar pengeluaran lain serta pengeluaran untuk pemenuhan infrastruktur. Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan investasi infrastruktur dan mampu memeliharanya agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi oleh pemerintah daerah dalam meringankan

financial distress merupakan investasi publik dalam arti tercermin dalam belanja modal (Jones & Walker, 2007).

Financial distress tidak hanya merugikan sistem keuangan pemerintah, tetapi juga merugikan organisasi yang bersangkutan secara keseluruhan. Pemerintah daerah dapat dilikuidasi jika sumber keuangan dan sumber daya manusianya hilang. Bank Dunia telah memperingatkan Indonesia tentang kemungkinan resesi global, yang pada suatu waktu dapat menyebabkan *financial distress* yang disebabkan oleh kekuatan internal dan eksternal. Keadaan *financial distress* dapat disebabkan oleh masalah internal perusahaan, seperti tata kelola perusahaan yang buruk, dan faktor eksternal perusahaan yang disebabkan oleh krisis ekonomi (Kristanti, 2019).

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebutkan kriteria yang ditetapkan untuk setiap daerah yang mengalami kondisi *financial distress* adalah setiap belanja modal di setiap daerah memiliki batas minimal 30%. Daerah belum dapat melakukan investasi secara tepat dalam setiap kegiatan pemerintahan yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat atau kesejahteraan rakyat jika alokasi belanja modal pemerintah daerah kurang dari 30%. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga mengatur bahwa belanja modal paling sedikit 30% dari total belanja daerah.

Sesuai pedoman yang ditetapkan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, komposisi belanja modal Provinsi Jawa Timur masih di bawah 30%. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dirilis Kementerian Keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, mengungkapkan hanya 13,78% dari total belanja daerah yang akan digunakan untuk belanja modal di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022. Kabupaten Bojonegoro dan Kota Surabaya merupakan dua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang mampu melampaui standar realisasi belanja modal minimum dengan persentase masing-masing lebih dari 30%. Rata-rata persentase realisasi belanja modal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 kabupaten/kota hanya sebesar 15,49%. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi terkait "*Financial Distress Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah*".

LANDASAN TEORI

Financial Distress

Dari sudut pandang ekonomi, *financial distress* dipahami sebagai modal kerja, ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran, dan peningkatan penjualan. Setiap definisi didasarkan pada sudut pandang yang dianutnya. Debitur dan kreditur biasanya dua pihak yang terlibat dalam *financial distress* (Kristanti, 2019). *Financial distress* didefinisikan sebagai kekurangan yang signifikan (dalam keuangan perusahaan) yang mengakibatkan kegagalan untuk membayar dividen pada saham preferen dan obligasi korporasi dan menyebabkan kebangkrutan (Beaver, 1966).

Bisnis yang melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk menghindari default atau karena mereka mengalami gagal bayar atas komitmen hutang adalah mereka yang berada dalam *financial distress* (Brown et al., 1992). *Financial distress* dapat terjadi dalam keadaan modal yang dimiliki perusahaan tidak cukup dalam membiayai operasional perusahaan, mengalami kerugian secara berturut turut, dan laba ditahan perusahaan mengalami penurunan.

Korporasi yang mengalami *financial distress* atau masalah keuangan adalah perusahaan yang tidak dapat memenuhi semua komitmennya kepada pihak yang berkepentingan (Brigham & Daves, 2003). Namun, dalam hal arus kas bisnis berarti hutang jangka panjang harus dibayar jika arus kas tahun pertama lebih rendah (Whitaker, 1999)..

Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi (Shukla & Geetika, 2022). Ketika laba bersih perusahaan secara konsisten negatif, tidak membayar dividen, dan penutupan bisnis, hal itu merupakan indikator krisis keuangan..

Sudut pandang lain berpendapat bahwa masalah likuiditas jangka panjang dan dua faktor eksternal yang signifikan dapat digunakan untuk menjelaskan *financial distress*. Penelitian arus kas, analisis strategi perusahaan, dan pelaporan keuangan perusahaan semuanya dapat mengungkapkan tanda-tanda *financial distress* (Hanafi, 2007).

Faktor Keuangan

Menurut Munawir (2014), rasio keuangan adalah rasio yang digunakan dalam sebuah organisasi perusahaan untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan saat ini dan potensi masa depan untuk mempermudah rancangan atau pengambilan keputusan. Rasio ini dapat melihat tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang akan dipergunakan dalam sebuah perusahaan, terkhusus dalam organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya dalam otonomi daerah yang sudah diterima. Prima (2020) menginterpretasikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dapat menunjukkan rasio keuangan, khususnya untuk pemerintah daerah.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Ciri khas pemerintah daerah yang menjadi ciri suatu tempat dan membedakannya dari daerah lain dikenal dengan karakteristiknya. Ukuran pemerintah akan memudahkan tugas-tugas operasional dan mempermudah penyampaian layanan publik yang memadai. Selain itu, kemudahan pengoperasian akan memudahkan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Menurut hal ini, kinerja pemerintah daerah secara finansial lebih baik seiring bertambahnya ukuran mereka.

Pemerintah daerah dengan aset besar berada di bawah banyak tekanan untuk mengungkapkan kinerja keuangan mereka. Dalam mengungkapkan laporan kinerjanya, pemerintah daerah akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan *good news*. Untuk meningkatkan peringkat kinerja pemerintah daerah, berita positif ini bisa datang dalam bentuk laporan kinerja yang kuat (Firdaus, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini mengkaji dampak rasio keuangan dan karakteristik pemerintah daerah terhadap *financial distress* pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022. Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Tabel 1. Variabel Dependen dan Variabel Independen

Variabel	Simbol	Definisi Operasional	Sumber Data
Financial Distress	FD	Diukur dengan membandingkan belanja modal pemerintah daerah dengan total belanja daerah (%)	DJPK Kemenkeu
Rasio Efektivitas	R_Efektivitas	Diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah (%)	DJPK Kemenkeu
Rasio Efisiensi	R_Efisiensi	Diukur dengan membandingkan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah (%)	DJPK Kemenkeu
Rasio Pertumbuhan	R_Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan diukur dengan membandingkan PAD tahun t – PAD tahun $t-1$ kemudian dibagi dengan PAD tahun $t-1$ (%)	DJPK Kemenkeu
Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Kemandirian	Kemandirian keuangan diukur dengan membandingkan PAD dengan total belanja pemerintah daerah	DJPK Kemenkeu
Jumlah Penduduk	Log(JP)	Logaritma natural dari jumlah penduduk (jiwa)	BPS

Sumber : Data diolah, 2023

Teknik Analisis

Pendekatan estimasi regresi data panel digunakan dalam penelitian ini. Alat analisis menggunakan software Eviews 12. Data *cross section* dan *time series* digabungkan untuk membuat database. 38 data *cross section* dari 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dimasukkan, dan 5 data *time series* termasuk statistik tahunan untuk tahun 2018 sampai dengan 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam regresi data panel, model harus dipilih sebelum analisis terhadap hasil estimasi. Terdapat tiga model pada regresi data panel yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Uji Chow dan uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik.

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.259838	(37,147)	0.0000
Cross-section Chi-square	160.217278	37	0.0000

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara *common effect* atau *fixed effect*. Hasil dari tabel 2 menunjukkan nilai Probabilitas lebih kecil dari nilai α sebesar 5% yang artinya *fixed effect* lebih baik dibandingkan *common effect*.

Uji hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	34.545727	5	0.0000

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* atau *random effect*. Hasil dari tabel 3 menunjukkan nilai Probabilitas lebih kecil dari nilai α sebesar 5% yang artinya *fixed effect* lebih baik dibandingkan *random effect*. Hasil estimasi model terpilih disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	692.3326	135.9949	5.090872	0.0000
R_EFEKTIVITAS	0.074679	0.029719	2.512848	0.0131
R_EFISIENSI	0.153819	0.042505	3.618854	0.0004
R_PERTUMBUHAN	-0.008111	0.013836	-0.586186	0.5586
KEMANDIRIAN	0.067748	0.156882	0.431842	0.6665
LOG(JP)	-51.42730	10.16507	-5.059219	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	3.067769	R-squared	0.600434	
Mean dependent var	15.50105	Adjusted R-squared	0.486272	
S.D. dependent var	4.866025	S.E. of regression	3.487713	
Akaike info criterion	5.532410	Sum squared resid	1788.129	
Schwarz criterion	6.267263	Log likelihood	-482.5789	
Hannan-Quinn criter.	5.830088	F-statistic	5.259506	
Durbin-Watson stat	1.745644	Prob(F-statistic)	0.000000	

Uji t

Berdasarkan tabel 4 variabel rasio efektivitas memiliki nilai koefisien regresi 0,074679 dan probabilitas nilai t-statistic sebesar $0,0131 < 5\%$ sehingga rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Variabel rasio efisiensi memiliki nilai koefisien sebesar 0,153819 dan probabilitas t-statistic sebesar $0,0004 < 5\%$, disimpulkan bahwa variabel rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Kemudian untuk rasio pertumbuhan diperoleh nilai koefisien -0,008111 dan probabilitas t-statistic sebesar $0,5586 > 5\%$ sehingga rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Selanjutnya untuk kemandirian keuangan pemerintah daerah diperoleh nilai koefisien sebesar 0,067748 dan probabilitas t-statistic sebesar $0,6665 > 5\%$ sehingga kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*. Terakhir, variabel logaritma natural jumlah penduduk diperoleh nilai koefisien sebesar -51,42730 dengan nilai probabilitas t statistic sebesar $0,0000 < 5\%$ sehingga dapat disimpulkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model ekonometrik yang digunakan berpengaruh secara simultan. Dari tabel 4 diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar $0,000000 < 5\%$, sehingga dapat disimpulkan semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen *financial distress*.

Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 merupakan ukuran seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dari Tabel 4 terlihat nilai *Adj. R-Squared* sebesar 0,486272 artinya 48,6% variasi variabel dependen *financial distress* dapat dijelaskan oleh variabel independen rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, kemandirian keuangan pemerintah daerah, dan jumlah penduduk. Sedangkan sisanya sebesar 51,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan temuan di atas, *financial distress* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel rasio efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendistribusikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mencegah kekurangan pendanaan dapat digambarkan dengan rasio efektivitas yang meningkat atau menurun yang dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, pengeluaran tidak selalu dapat secara jelas menggambarkan kemampuan pendapatan daerah untuk menjelaskan distribusi belanja modal dalam pengalokasian pelayanan publik, karena realisasi PAD tidak dapat langsung dideskripsikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik kinerja pemerintah daerah maka semakin besar pula rasio ini. Namun, hal itu dapat berdampak buruk pada *financial distress* saat mendistribusikan belanja modal. Temuan penelitian ini konsisten dengan Gorina et al. (2017) yang menemukan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.

Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap *Financial Distress*

Financial distress secara signifikan dipengaruhi oleh rasio efisiensi. Semakin tinggi rasio efisiensi, semakin buruk kinerja pemerintah daerah karena tidak efisien dalam mengalokasikan pendapatan yang ada untuk dibelanjakan, yang akan menyebabkan kekurangan dana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi yang positif. Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan betapa buruknya pengelolaan dana belanja oleh pemerintah daerah, yang mengakibatkan sedikitnya uang untuk digunakan belanja modal yang pada akhirnya membuat pembayar pajak berada dalam situasi keuangan yang sulit. Karena rasio efisiensi berada dalam kisaran tingkat efisiensi, menurut temuan penelitian, tidak mungkin membandingkan secara langsung *financial distress* dengan tingkat rasio efisiensi. Namun, kabupaten dan kota terus menghadapi tantangan keuangan yang signifikan, sehingga rasio efisiensi tidak mungkin secara akurat menggambarkan bagaimana belanja modal dialokasikan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Lazyra (2016) yang menemukan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Pengaruh Rasio Pertumbuhan Terhadap *Financial Distress*

Financial distress tidak berpengaruh terhadap rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif dengan *financial distress*, yang menjelaskan mengapa tingkat *financial distress* pemerintah daerah meningkat seiring dengan peningkatan rasio pertumbuhan. Mengingat pertumbuhan PAD yang tinggi tidak serta merta memberikan beban yang ringan, hal ini dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh daerah yang menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Akibatnya, biaya dalam PAD memungkinkan alokasi belanja modal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Wulandari & Arza (2020), yang menemukan bahwa rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress*

Kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah daerah yang mandiri secara finansial tidak selalu dapat meningkatkan anggaran belanja modalnya untuk melayani masyarakat lebih baik dan meringankan *financial distress*. Pemerintah daerah dengan kemandirian keuangan yang kuat di mana pemerintah daerah tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau provinsi cenderung tidak mengalami *financial distress* atau kekurangan sumber daya untuk membiayai pengeluaran selain kebutuhan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari & Arza (2019), yang menemukan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Financial Distress*

Financial distress tidak dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi cenderung tidak mengalami kondisi *financial distress* karena jumlah penduduk yang tinggi menggambarkan sumber daya yang tinggi di daerah tersebut, sumber daya yang tinggi dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan jumlah penduduk yang berarah negatif terhadap *financial distress* menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk di suatu daerah, semakin rendah tingkat *financial distress*. Jumlah penduduk di daerah juga menggambarkan jumlah sumber daya yang dapat digunakan dalam pemerintah daerah. Karena jumlah penduduk mencerminkan jumlah transfer (sumber daya) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang lebih besar memiliki tingkat kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang lebih tinggi dan kemungkinan mengalami *financial distress* yang lebih rendah (Wulandari & Arza, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan dan terhadap *financial distress* di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan jumlah penduduk. Sedangkan rasio pertumbuhan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress* di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mencegah kekurangan pendanaan dapat digambarkan dengan rasio efektivitas yang meningkat atau menurun yang dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio efisiensi yang tinggi menunjukkan betapa buruknya pengelolaan dana belanja oleh pemerintah daerah, yang mengakibatkan sedikitnya uang untuk digunakan belanja modal yang pada akhirnya membuat pembayar pajak berada dalam situasi keuangan yang sulit. Sementara itu, jumlah penduduk yang tinggi cenderung tidak mengalami kondisi *financial distress* karena jumlah

penduduk yang tinggi menggambarkan sumber daya yang tinggi di daerah tersebut, sumber daya yang tinggi dapat meningkatkan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Beaver, W. H., 1966. *Financial Reporting: An Accounting Revolution*. Second edition. NJ: Prentice-Hall Inc
- Brigham, E. F. dan Daves P. R. 2003. *Intermediate Financial Management with Thomson One*. United States of America: Cengage South-Western.
- Brown, D. T., C. M. James dan R. M. Mooradian. 1992. The Information Content of Distressed Restructurings Involving Public and Private Debt Claims. *Journal of Financial Economics* 33: 92-118.
- Firdaus, M. H. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(01), 1-14.
- Gorina, Evgenia et al. 2017. *Local Fiscal Distress: Measurement and Prediction*. Public Financial Publications. Inc.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*.
- Kristanti, Farida Titik (2019). *Financial Distress : Teori dan Perkembangannya Dalam Konteks Indonesia* (1st ed.). Malang: Inteligensia Media.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting analysis journal*, 1(1), 27-35.
- Lazyra, K. (2016). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota medan. Skripsi Program Studi Akuntansi, 1–63.
- Miswanto, M., & Aslan, V. S. (2019). Analisis kinerja keuangan: Sesudah dan sebelum krisis ekonomi global 2008 pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 16(1), 19-19.
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Prima, S. Y. dan N. (2020). Pengendalian Persediaan Bahan Baku Garam Menggunakan Metode EOQ (Economic Order Quantity) Pada Pabrik Es WIRA JATIM. *Journal Ilmu Dan Riset Manajemen*.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425-1436.
- Shukla, A., & Geetika. (2022). Impact of corporate social responsibility on financial performance of energy firms in India. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 16(1), 88–105. <https://doi.org/10.1504/IJBGE.2022.119356>
- Wulandari, Y., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Financial Distress. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160-3178.